

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH
DAERAH BERDASARKAN VALUE FOR MONEY
(Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
(BPKAD) Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : JULIANDA SYAHPUTRA TANJUNG
NPM : 1705170090
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 25 Februari 2022, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : JULIANDA SYAHPUTRA TANJUNG
NPM : 1705170090
Program Studi : AKUNTANSI
Konsetrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN VALUE FOR MONEY (STUDI KASUS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA)
Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Assoc. Prof. Dr. Hj. MAYA SARI, SE., M.Si

(ISNA ARDILA, SE., M.Si)

Pembimbing

(NOVI FADHILA, S.E., M.M)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

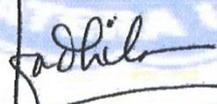
Skripsi ini disusun oleh :

NAMA : Julianda Syahputra Tanjung
NPM : 1705170090
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL PENELITIAN : Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Dan aset Derah (BPKAD) Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2021

Rembimbing Skripsi



Novy Fadhila, S.E., M.M

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Julianda Syahputra Tanjung
Npm : 1705170090
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) (BPAKD) Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
BAB 1	<ul style="list-style-type: none">- Judul bentuknya piramida terbalik- Alasan pemilihan tempat riset- Fenomena masalah belum ada	12 Juli 2021	
BAB 2	<ul style="list-style-type: none">- Refrensi hanya 5 tahun terakhir- Penelitian terdahulu tambahkan kolom sumber- Sempurnakan kerangka konsep	12 Agustus 2021	
BAB 3	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki kalimat dan kata untuk sumber data- Sempurnakan bab 3- Kutipan refrensi harus gunakan 3 jurnal dosen umsu	24 Agustus 2021	
BAB 4	<ul style="list-style-type: none">- Pembahasan setiap variabel dikuatkan dengan teori- Penambahan penelitian terdahulu pada bagian efektivitas	23 Oktober 2021	
BAB 5	<ul style="list-style-type: none">- Kesimpulan sesuai dengan pembahasan	26 Oktober 2021	
Daftar Pustaka	<ul style="list-style-type: none">- Pakai mendeley	26 Oktober 2021	
Persetujuan sidang meja hijau		30 Oktober 2021	

Medan, 30 Oktober 2021

Diketahui Oleh :
Ketua Program Studi

(Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si)

Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing

(Novi Fadhila, SE., MM)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : JULIANDA SYAHPUTRA TANJUNG
NPM : 1705170090
Program Studi : Akuntansi
konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN VALUE FOR MONEY (STUDI KASUS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



JULIANDA SYAHPUTRA TANJUNG

ABSTRAK

ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN VALUE FOR MONEY (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara)

JULIANDA SYAHPUTRA TANJUNG

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang berdasarkan *value for money*. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, dan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang dengan metode *value for money* yang diukur dengan rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuatif dimana Rasio ekonomis Kabupaten Deli Serdang mengalami kestabilan atau bisa disebut dengan sudah cukup ekonomis dalam penghematan belanja pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang, Sedangkan untuk rasio efektivitas mengalami fluktuatif, dan rasio efisiensi mengalami penurunan.

Kata Kunci: *Value For Money*, **Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas**

ABSTRACT

ANALYSIS OF PERFORMANCE MEASUREMENT OF LOCAL GOVERNMENTS BASED ON VALUE FOR MONEY (Case Study of Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) Deli Serdang Regency, North Sumatra Province)

JULIANDA SYAHPUTRA TANJUNG

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

This research was conducted with the aim of measuring the performance of the local government of Deli Serdang Regency based on value for money. This research approach uses descriptive research. The data collection technique in this study uses documentation techniques, and the analysis technique used is descriptive analysis technique. The results showed that the performance of the local government of Deli Serdang Regency using the value for money method as measured by the economic ratio, efficiency ratio, and effectiveness ratio in the last 5 years, namely 2016 to 2020, fluctuated where the economic ratio of Deli Serdang Regency experienced stability or it can be said that it is quite economical in saving local government spending in Deli Serdang Regency, while the effectiveness ratio has fluctuated, and the efficiency ratio has decreased.

Keywords: Value For Money, Economical, Efficiency, Effectiveness

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Sastra 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul penelitian ini yaitu : **“Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta yang telah membesarkan penulis sejak dalam buaian hingga saat ini dengan segala rasa cinta dan kasih sayang yang tidak pernah surut dan juga yang telah mendidik, membina, memberikan dorongan dan do'a kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H.Januri, S.E.,M.M.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan S.E.,M.Si Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE.,M.Si Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Accos. Prof Dr. Zulia Hanum S.E.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riva Ubar Harahap, SE.,M.Si Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Novi Fadhila, SE, MM selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing saya dalam proses penyusunan proposal ini.
9. Teman-teman seperjuangan di Konsentrasi Sektor Publik yang selalu memberikan semangat dan dukungan penulis.
10. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menyusun Proposal Penelitian ini.

Akhir kata semoga Proposal Penelitian ini dapat dimanfaatkan dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk perkembangan pengetahuan bagi penulis maupun bagi pihak yang berkepentingan.

Aminn ya Rabbal' Aalamin

Billahi fii sabililhaq, fastabiqulhairat

Wassalamualaikum Wr. Wb

Medan, Februari 2022

Penulis

JULIANDA SYAHPUTRA TANJUNG
NPM.1705170090

DAFTAR ISI

ABSTRAK	3
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Rumusan Masalah	11
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Manfaat Penelitian	11
BAB II	13
KAJIAN PUSTAKA	13
1.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Keuangan Daerah	13
2.1.2 Kinerja Keuangan daerah	32
2.1.3 Value For Money	34
2.3 Kerangka Berfikir	43
BAB III	46
METODE PENELITIAN	46
3.1 Pendekatan Penelitian	46
3.2 Defenisi Operasional Penelitian	46
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	48
3.4 Jenis dan Sumber Data	48
3.4.1 Jenis Data	48
3.4.2 Sumber Data	49
3.5 Teknik Analisis Data	49
3.5.1 Analisis Deskriptif	50
BAB IV	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Deskripsi Data	51
4.2 Analisis Data	54

1) Ekonomis.....	54
3. Efisiensi	58
3.Rasio Efektivitas.....	61
4.3 Pembahasan.....	65
BAB V	69
KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap organisasi baik bisnis maupun publik menjadikan kinerja sebagai perhatian utama untuk mencapai kinerja yang baik. Kinerja bisa diketahui jika individu atau kelompok tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan berupa tujuan-tujuan atau target-target yang hendak ingin dicapai. Untuk menilai sukses tidaknya suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan dan sasarannya diperlukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja harus berdasarkan karakteristik operasional organisasi untuk mendefinisikan indikator dan pengukuran yang digunakan.

Organisasi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi nonprofit yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain. Lembaga pemerintah melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan disatu sisi dan disisi lain lembaga ini harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan, salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penghasilan adalah dengan mengoptimalkan Pendapatan Daerah. (Jaenuar, 2016)

Keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun diakui variabel lain juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti misalnya variabel sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana, dan prasarana serta variabel

penunjang lainnya. Pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber daya keuangan daerah dipandang sebagai bagian yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kondisi yang mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat karena pada era perkembangan ekonomis ini masyarakat menjadi semakin cerdas dan kritis menuntut dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga lembaga sektor publik. Tuntutan yang dilakukan masyarakat ini sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel.

Pengukuran Kinerja secara umum adalah pengukuran terhadap kinerja yang dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat penyimpangan atau deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan (Hery, 2019: 73). Artinya pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya pada masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam perusahaan. Pengukuran kinerja dianggap sebagai salah satu faktor penting karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan, pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan system imbalan dalam perusahaan, misalnya untuk menentukan tingkat gaji karyawan

maupun reward yang layak Harefa (2017). Pengukuran kinerja merupakan bagian dari fungsi pengendalian manajemen karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk melakukan pengendalian aktivitas Muhmudi (2019: 60). Setiap aktivitas harus terukur kinerjanya agar dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Dan bagi organisasi sektor publik khususnya di pemerintahan daerah pengukuran pembangunan kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer publik dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif .

Kepentingan urusan publik menjadikan indikator pengukuran kinerja sebagai alat evaluasi terhadap kinerja dan kemampuan daerah agar Pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerja ditahun berikutnya dan memulihkan kinerja dengan pembanding skema kerja dan pelaksanaannya, serta pengukuran kinerja juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan yaitu kemampuan yang menunjukan bahwa uang publik telah dikelola secara efektivitas, efisien dan ekonomis. Suatu sistem pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yang terkait dengan pengelolaan APBD perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif dan efisien serta akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Pengukuran kinerja yang digunakan oleh organisasi sektor publik, salah satunya adalah dengan menggunakan metode *value for money*.

Value For Money merupakan anggaran yang berbasis kinerja menuntut adanya output yang optimal atas pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomis, efisien, efektif. Efektivitas adalah menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya Mardiasmo (2017: 134). Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efisiensi merupakan suatu rasio perhitungan perbandingan antara *input* yang seminimalnya untuk mencapai *output* yang semaksimalnya. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan *input*. Semakin besar *output* dibandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Ekonomis merupakan hubungan antara nilai uang (pasar) dan masukan atau praktik pembelian barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan dan pada harga terendah. Pengukuran ekonomis hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan.

Pengukuran kinerja dilakukan karena selama ini sektor publik dinilai sebagai sarang inefisiensi pemborosan, dan sumber kebocoran dana. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan kinerja yang mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Dengan dilakukannya maksud dari pengukuran kinerja, maka kita juga bisa memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja periode berikutnya. Selain itu, kita juga bisa memastikan apakah pengambilan keputusan dilakukan secara tepat dan objektif.

Laporan yang digunakan untuk pengukuran kinerja adalah Laporan Realisasi Anggaran. Menurut Sihombing (2018) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan neraca, Laporan Realisasi Anggaran menduduki prioritas yang lebih penting, dan LRA ini merupakan jenis laporan keuangan daerah yang dahulu dihasilkan sebelum kemudian diisyaratkan untuk membuat laporan neraca dan arus kas.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara terbuka, dan bertanggungjawab untuk kemakmuran masyarakat, demi terlaksananya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dalam melaksanakan asas otonomi, daerah memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dapat diwujudkan dalam bentuk rencana kerja Pemerintahan daerah yang mana dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan keperluan daerah yang dikelola sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah terdiri dari berbagai prosedur yang harus dilalui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau yang sering disebut (PPKD).

Keuangan daerah memiliki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah, sebab Pemerintahan daerah tidak akan dapat berjalan dengan efektif tanpa sistem pengelolaan keuangan yang baik yang merupakan salah satu kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu proses yang paling penting dalam pengelolaan keuangan daerah ialah dalam hal pertanggungjawaban keuangan daerah.

Bentuk pertanggungjawaban keuangan negara termasuk keuangan daerah diatur secara rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, terkhusus Bab II tentang pelaporan keuangan dan kinerja, bahwa dalam rangka pertanggungjawaban APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

Bentuk utama pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah adanya kewajiban pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran untuk membuat laporan keuangan dan laporan kinerja yang kemudian dievaluasi oleh BPK, DPRD, dan Kementerian Dalam Negeri. Namun, adapun Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h, menyatakan bahwa:

“PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah”

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang sering disingkat PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Tiap-tiap daerah memiliki Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan sebutan yang berbeda-beda tergantung Peraturan Daerah yang telah ditetapkan pada masing-masing daerah. Seperti di Kabupaten Deli Serdang, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memiliki sebutan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau disebut juga BPKAD.

Sebagai salah satu aparatur lembaga di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kabupaten Deli Serdang untuk peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan aparatur Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Deli Serdang, meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Deli Serdang yang memberikan pelayanan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam menghasilkan pelayanan publik belum terpenuhi sehingga munculnya beberapa permasalahan dan keluhan, mengidentifikasi bahwa pelayanan yang diberikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Deli Serdang belum memenuhi kepuasan yang diharapkan sehingga perlu perhatian khusus. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dengan melakukan pengukuran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Deli Serdang.

Kabupaten Deli Serdang kembali mendapatkan penghargaan atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2019 dari Kementerian Keuangan karena Kabupaten Deli Serdang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumut. Wujud dari keberhasilan tersebut, Menteri Keuangan memberikan penghargaan melalui Dirjen Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut yang diwakili oleh Kepala Bidang PAPH, Mercy Monika R. Sitompul. Penghargaan tersebut diberikan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tebing Tinggi, Kamis (12/11).

Sebelumnya, Kabupaten Deli Serdang juga mendapatkan penghargaan yang sama di Tahun 2019. Kepala Dirjen Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut yang diwakili oleh Kepala Bidang PAPK, Mercy Monika R. Sitompul mengatakan Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2020 yang telah dilaksanakan oleh Penyerahan Plakat WTP atas Capaian Opini LKPD Tahun 2019 Kementerian Keuangan pada tanggal 22 September 2020 secara virtual. Tahun ini pemerintah pusat kembali meraih Opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) tahun 2019. Pencapaian ini tentunya didukung dengan semakin meningkatnya kualitas dari Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) audited tahun 2019 yang ditandai dengan meningkatnya jumlah opini WTP dari LKKL, dari sebelumnya 81 menjadi 84 pada Tahun Anggaran 2019 dari total 87 K/L. Pencapaian positif juga dialami pada pengelolaan keuangan daerah (Kominfo. deliserdangkab.go.id).

Mahmudi (2016) Ekonomis adalah terkait dengan penghematan anggaran untuk memperoleh *input* dengan tidak melakukan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan operasional. Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Tingkat ekonomis diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.

Rasio efisiensi dilakukan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan dengan menggunakan penghematan biaya yang lebih sedikit. Menurut Mahmudi (2019), Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output* per unit *input*. Suatu

organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*).. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Dengan semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Sebaliknya bila rasio efisien semakin tinggi menunjukkan bahwa besarnya biaya yang dikeluarkan Abdul (2019).

Rasio efektivitas dilakukan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam pemungutan pendapatan. Menurut Mahmudi (2019), Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin efektif.

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan suatu usaha, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, penurunan pendapatan akan mengakibatkan kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu..

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Wardiman Zain (2017) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng, hasil perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun 2012-2016 ekonomis karena memiliki rata-rata rasio ekonomi, dari segi efisiensi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun 2012-2016 yaitu efisien, dan dari segi efektivitas, rata-rata rasio efektivitas dari tahun 2012-2016, menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun 2012-2016 tidak efektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Prinsip Value For Money (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang)”*

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas ada terdapat beberapa masalah yang muncul yaitu:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Deli Serdang seharusnya melakukan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Terdapat penyimpangan atau deviasi dari rencana yang telah ditentukan selama pelaksanaan kinerja.
3. Adanya kebocoran dana di sektor publik dan sebagai sarang inefisiensi pembocoran.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat rasio efektivitas penggunaan belanja daerah Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana tingkat rasio efisiensi daerah Kabupaten Deli Serdang?
3. Bagaimana tingkat rasio ekonomis belanja daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat rasio efektivitas penggunaan belanja daerah Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui tingkat rasio efisiensi Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui tingkat rasio ekonomis Kabupaten Deli Serdang.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dijadikan masukan yang bermanfaat untuk mengetahui bagaimana pengukuran kinerja pemerintah daerah menggunakan *value for money* dan dapat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan mengenai konsep *value for money*.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dijadikan masukan yang bermanfaat untuk mengambil kebijakan, terutama yang berkaitan khususnya mengenai konsep *value for money* sebagai penilaian kinerja.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penulis selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan kajian yang lebih luas lagi guna menyempurnakan penelitian tentang pengukuran kinerja pemerintah daerah menggunakan *value for money*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

2.1.1 Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa dalam keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu :

1. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah.
2. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

2.1.1.2 Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

Dasar hukum pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
6. UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. PP No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
8. PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.1.1.3 Asas Umum Keuangan Daerah

Berdasarkan pasal 66 UU No. 33/2004, asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. APBD, perubahan APBD, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi.
4. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
5. Surplus APBD dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tahun anggaran berikutnya.
6. Penggunaan surplus APBD dimaksudkan untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan dalam perusahaan daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

2.1.1.4 Manajemen Keuangan Daerah

Guna mewujudkan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, dibutuhkan pengelolaan dengan suatu sistem manajemen keuangan yang jelas dan berdaya guna. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa manajemen mempunyai empat fungsi dasar, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian.

Konsep dasar dari manajemen tersebut dapat diaplikasikan dalam berbagai jenis organisasi, termasuk lingkungan organisasi sector publik tidak terkecuali dalam pengelolaan keuangan daerah. Beberapa prinsip penting manajemen keuangan daerah yaitu:

1. Taat pada peraturan perundang-undangan, dengan maksud bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
3. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
4. Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.
5. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
6. Bertanggungjawab merupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
7. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
8. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
9. Manfaat maksudnya keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Secara garis besar, manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Mardiasmo (2018).

2.1.1.5 Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (PP 58 /2005, pasal 1 dalam Halim (2019).

Pengelolaan keuangan daerah menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *value for money*. Transparansi merupakan wujud adanya keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Dalam prinsip ini, anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan bersama, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, adapun prinsip akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran, mulai dari perencanaan penyusunan, hingga pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Sedangkan prinsip *value for money* menerapkan prinsip ekonomi, efisien, dan efektifitas dalam proses penganggaran. Ekonomi

berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa dalam penggunaan dana masyarakat (*public money*) harus menghasilkan *output* yang maksimal (berdayaguna). Selanjutnya, efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran harus mencapai target atau tujuan yang menyangkut kepentingan *public* Yuwono (2019).

Prinsip-prinsip lain yang juga dianut dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti yang tercantum dalam pasal 67 UU No. 33/2004 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan daerah tentang APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
2. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
3. Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi, hibah, dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah didanai melalui APBD.
4. Keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.
5. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.
6. Dalam hal APBD diperkirakan *defisit*, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup *defisit* tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

7. Dalam hal APBD diperkirakan *surplus*, ditetapkan penggunaan *surplus* tersebut dalam Peraturan daerah tentang APBD.

Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, agar terwujud tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, diperlukan suatu proses pengawasan dan pengendalian pengelolaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, Yuwono (2019).

Proses ini diperlukan agar keseluruhan tahapan siklus pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga penyimpangan atau kesalahan dapat dihindari atau diminimalisasi.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan utamanya terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Fungsi pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah berdasar pasal 130 PP No. 58/2005 dan pasal 309 Permendagri No. 13/2006 disebutkan bahwa pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

1. Pemberian pedoman mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, pertanggung jawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.

2. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, serta pertanggung jawaban keuangan daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai kebutuhan.
3. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah serta kepada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
4. Penelitian dan pengembangan dilaksanakan secara berkala atau pun sewaktu-waktu dengan memperhatikan susunan pemerintahan.

Secara ringkas, dalam sistem pengelolaan keuangan daerah terdapat tiga siklus utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Pada tahap perencanaan, *input* yang digunakan adalah aspirasi masyarakat melalui musrenbang yang dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah sebagai cikal bakal keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan strategis yang akhirnya memberi payung dan arah bagi suatu APBD. Dari musrenbang tersebut dihasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang kemudian dijabarkan dalam usulan kegiatan/aktivitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan diproses dengan Standar Analisis Belanja (SAB) sehingga setiap aktivitas yang diusulkan dapat mencerminkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil yang telah ditetapkan (et al., 2018).

Selain itu, anggaran yang diusulkan juga harus mencerminkan (anggaran) kinerja karena telah diproses dengan menekankan aspek kinerja. Pada tahap pelaksanaan, input yang digunakan adalah APBD yang sudah ditetapkan untuk kemudian dilaksanakan dan dicatat melalui sistem akuntansi guna menghasilkan laporan pelaksanaan APBD, baik berupa laporan semesteran maupun tahunan sebagai laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Sedangkan pada tahap pengendalian, meliputi penyampaian laporan pertanggung jawaban kepala daerah kepada DPRD, proses evaluasi laporan pertanggung jawaban, serta keputusan evaluasi berupa penerimaan atau penolakan laporan pertanggung jawaban Yuwono (2019).

2.1.1.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan dan pengawasan operasi dalam suatu organisasi laba dimana tingkat formalitas suatu budget tergantung besar kecilnya operasional perusahaan. Pendapatan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam setiap perusahaan. Tanpa ada pendapatan mustahil akan didapat penghasilan atau earnings. Belanja daerah adalah belanja yang tertuang dalam APBD yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan ke dalam belanja aparatur dan belanja publik. Belanja publik merupakan belanja yang penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat. Meskipun demikian, seiring perubahan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pengelolaan keuangan daerah sejak pemberlakuan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2003 yang selanjutnya diganti

dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006, kategorisasi belanja daerah selalu mengalami perubahan nama.

Guna menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya secara sistematis dan akuntabel, diperlukan suatu rencana keuangan yang andal dan terwujud dalam suatu penganggaran. Selain sebagai alat ukur dan pertanggung jawaban kinerja pemerintah, sistem penganggaran yang dikembangkan oleh pemerintah berfungsi sebagai pengendali keuangan, rencana manajemen, prioritas penggunaan dana, dan pertanggung jawaban kepada publik. Terkait dengan rencana manajemen, sistem penganggaran berfungsi sebagai suatu metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan dimana manfaat tersebut dideskripsikan melalui seperangkat sasaran dan dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Untuk mengidentifikasi keterkaitan biaya dengan manfaat serta keterkaitan antara nilai uang dan hasil di tingkat pemerintahan daerah, pemerintah daerah menuangkan penganggaran tersebut dalam suatu rencana keuangan yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Meurut pasal 1 UU Nomor 32 tahun 2004 APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD yang disetujui oleh DPRD. Fungsi APBD sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu:

1. Fungsi Otorisasi, bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa

dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.

2. Fungsi Perencanaan, bermakna bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan, bermakna Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah.
5. Fungsi Distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilitas memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Jika keuangan daerah (APBD) dapat dikatakan sebagai jantung pengelolaan lembaga pemerintahan daerah, maka pengelolaan APBD merupakan denyut nadi yang merefleksikan dinamika keuangan daerah sekaligus merupakan bagian integral dari sistem keuangan Negara sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2003. Dalam UU No. 32/2004 juga disebutkan bahwa pengelolaan APBD merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pengelolaan pemerintah daerah Yuwono (2019). Mengingat bahwa

salah satu sumber pendanaan APBD berasal dari APBN, maka proses penyusunan APBD diatur dalam UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang penjabarannya diatur dalam PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP terkait lainnya.

Arti penting anggaran daerah dapat dilihat dari aspek-aspek berikut ini:

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*) dan *trade offs*.

Menurut (Hanum, 2011) berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa struktur APBD terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan (UU No. 33/2004 pasal 1). Pendapatan daerah dalam struktur APBD dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
2. Belanja Daerah Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. (UU No. 33/2004 pasal 1). Belanja daerah

dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi/kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan belanja, urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kinerja dalam pencapaian standar minimal sesuai peraturan perundangundangan.

3. Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibiayai kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya (UU No. 33/2004 pasal 1). Pembiayaan daerah bersumber dari: sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pinjaman daerah.

2.1.1.7 Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah, sebagaimana yang telah didefinisikan sebelumnya, mempunyai makna sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sumber pendapatan daerah diperoleh dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Ketentuan mengenai pajak daerah ditetapkan dengan Undang-undang. Sedangkan penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Retribusi Daerah

Sebagaimana pajak daerah, ketentuan mengenai retribusi daerah juga ditetapkan dengan Undang-Undang. Sementara penentuan tarif dan tata cara pemungutan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup: bagian laba atas penyertaan modal baik pada perusahaan milik daerah/BUMD, perusahaan milik pemerintah/BUMN, maupun pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Ketentuan mengenai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Lain-lain PAD yang Sah Lain-lain PAD yang sah

Meliputi dari : hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih antara nilai tukar

rupiah terhadap mata uang asing; serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber dana yang berasal dari pos Dana Perimbangan terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil bersumber dari: pajak, yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPH); serta bersumber dari Sumber Daya Alam (bukan pajak) yang berasal dari hasil kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB dibagi antara daerah propinsi, daerah kabupaten/kota dan pemerintah dengan pembagian sebagai berikut:

- 1) Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbalan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.

- 2) Penerimaan negara untuk BPHTB dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.
- 3) 10% (sepuluh persen) penerimaan PBB dan 20% (dua puluh persen) penerimaan BPHTB yang menjadi bagian pemerintah pusat, dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota.

Adapun Dana Bagi Hasil yang berasal dari Sumber Daya Alam (bukan pajak) ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Propinsi Sumber Daya Hutan (PSDH), sektor pertambangan umum, sektor perikanan serta sektor pertambangan panas bumi dibagi dengan imbalan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.
- 2) Penerimaan negara dari sumber daya alam sector kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan imbalan 60% (enam puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 40% (empat puluh persen) untuk daerah.
- 3) Penerimaan negara dari sumber daya alam sector pertambangan minyak bumi (setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan), dibagi dengan imbalan 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk pemerintah pusat dan 15,5% (lima belas setengah persen) untuk daerah.

- 4) Penerimaan Negara dari sumber daya alam sector pertambangan gas bumi (setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan), dibagi dengan imbalan 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk pemerintah pusat dan 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk daerah.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Ketentuan mengenai DAU dapat dijabarkan sebagai berikut:
- 1) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Pendapatan Dalam Negeri Neto adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan Negara yang dibagikan kepada daerah.
 - 2) DAU untuk suatu daerah provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU untuk seluruh daerah provinsi. Bobot daerah provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah provinsi.
 - 3) DAU untuk suatu daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota dengan jumlah DAU untuk

seluruh kabupaten/kota. Bobot daerah kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan total fiskal seluruh daerah kabupaten/kota. Celah fiskal daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil.

- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Sedangkan kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

- a) Hibah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
- b) Dana Darurat adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

2.1.1.8 Jenis Belanja Daerah

Menurut permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 36 menjelaskan belanja daerah menurut kelompok belanja dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Belanja Tidak Langsung Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Kelompok belanja tidak langsung menurut permendagri no.13 tahun 2006 dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai (Belanja kompensasi, tunjangan dan uang represtasi)
 - b. Bunga
 - c. Subsidi
 - d. Hibah
 - e. Bantuan Sosial
 - f. Belanja Bagi Hasil
 - g. Bantuan Keuangan
 - h. Belanja Tidak Terduga

2) Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Belanja langsung dibagi menurut belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan jasa
- c. Belanja Modal

2.1.2 Kinerja Keuangan daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur,

demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Pengertian analisis keuangan itu sendiri adalah sebuah cara untuk menganalisis laporan keuangan yang mengungkapkan hubungan antara suatu jumlah dengan jumlah lainnya atau antara suatu pos dengan pos lainnya. Penggunaan analisis keuangan sebagai alat analisis kinerja secara umum telah digunakan oleh lembaga komersial. Dalam rangka mengukur kinerja dan kemampuan keuangan daerah dalam mengelola diperlukan analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan Mardiasmo (2018).

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh halim dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keuangan Daerah, analisis rasio keuangan dibagi menjadi dua yaitu analisis kinerja keuangan dan analisis kemampuan keuangan.

2.1.3 Value For Money

2.1.3.1 Pengertian *Value For Money*

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan *outcome* secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity and service coverage*).

Permasalahan yang sering dihadapi pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur *output*, karena *output* yang dihasilkan tidak selalu berupa *output* yang berwujud, akan tetapi lebih banyak berupa *intangible output*.

Value for Money merupakan suatu konsep penilaian kinerja suatu organisasi publik berdasarkan tingkat keberhasilan suatu program kerja mengacu kepada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas Riadi (2020)

Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *Value for Money*, yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna), dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

2.1.3.2 Pengembangan Indikator *Value For Money*

Peranan indikator kinerja dalam menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Hal ini tidak berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian program yang definitif.

Menurut Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa indikator *Value For Money* dibagi menjadi dua bagian seperti yang dijelaskan menurut antara lain:

1. Indikator alokasi Biaya (Ekonomi dan Efisien)
2. Indikator kualitas pelayanan (Efektifitas)

Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Pihak internal dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan serta efisien biaya. Dengan kata lain, indikator kinerja berperan untuk menunjukkan, memberikan indikasi atau memfokuskan perhatian pada bidang yang relevan dilakukan tindakan perbaikan.

Pihak eksternal dapat digunakan indikator kinerja sebagai kontrol dan sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik. Pembuat dan penggunaan indikator kinerja tersebut membantu setiap pelaku utama dalam proses pengeluaran publik untuk memonitor pencapaian program dan mengidentifikasi masalah yang penting.

2.1.3.3 Karakteristik indikator kinerja

Menurut Mahmudi (2016) menyatakan bahwa indikator kinerja yang dikembangkan hendaknya memiliki karakteristik seperti yang dijelaskan antara lain:

1. Sederhana dan mudah dipahami
2. Dapat diukur
3. Dapat dikuantifikasikan, misalnya dalam bentuk rasio, persentasi dan angka.
4. Dikaitkan dengan standar atau target kinerja.
5. Berfokus pada *costumer service*, kualitas dan efisiensi.
6. Dikaji secara teratur.

Adapun penjelasan lebih lanjut:

1. Sederhana dan mudah dipahami.

Yang menjadi indikator kinerja hendaknya sederhana hal ini dapat menyebabkan yang mengukur dan memberikan penilaian tidak terlalu bingung.

2. Dapat diukur.

Yang menjadi indikator kinerja hendaknya dapat diukur bukan sesuatu yang abstrak.

3. Dapat dikuantifikasikan, misalnya dalam bentuk rasio, persentase dan angka.
4. Dikaitkan dengan standar atau target kinerja.

Hal ini sudah jelas bahwa indikator memang dikaitkan dengan target kinerja yang mana nantinya akan lebih mudah dalam pelaksanaannya.

5. Berfokus pada *costumer service*, kualitas, dan efisiensi.
6. Dikaji secara teratur.

Jika indikator tidak dikaji secara teratur tentu saja nantinya akan menjadi sia-sia tidak ada *follow up* nya.

2.1.3.4 Manfaat Indikator Kinerja

Informasi mengenai kinerja sangat penting dalam rangka menciptakan *good governance*. Indikator kinerja tersebut diorientasikan sebagai pedoman bukan sebagai alat pengendalian. Indikator kinerja memiliki peran penting sebagai proses pembentukan organisasi pembelajar (*learning organization*). Jika organisasi terus-menerus belajar bagaimana memperbaiki kinerja, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mencapai target, maka indikator kinerja akan bersifat mendorong dan memotivasi dalam cara yang positif.

2.1.3.5 Tiga Pokok Bahasan Indikator Value For Money

Menurut Mardiasmo (2018) ada tiga pokok bahasan indikator *value for money* seperti yang dijelaskan antara lain:

1. Ekonomi
2. Efisiensi
3. Efektifitas

Menurut Rahayu (2018) menyatakan bahwa indikator *Value For Money* adalah:

1. Ekonomis
2. Efisiensi
3. Efektifitas

Ada perbedaan antara indikator yang dikemukakan Mardiasmo dengan Indra Bastian tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah karena pada intinya arti dan maksud dari teori mereka adalah sama. Adapun penjelasan lebih lanjut:

1. Ekonomi

Merupakan perbandingan antara nilai input dengan itu sendiri, apakah sudah tepat guna. Pengertian ekonomi sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Dengan demikian, pada hakekatnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dan ekonomi, karena kedua-duanya terdapat penghapusan atau penurunan biaya-biaya (*cost reduction*). Terjadinya peningkatan manfaat yang besar.

2. Efisiensi

Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang seminimum mungkin.

3. Efektifitas

Pengertian efektifitas menggambarkan akibat dari dampak (*outcome*) dari output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

2.1.3.6 Indikator Rasio Ekonomis Pendapatan dan Belanja Daerah

Rasio ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Semakin besar

persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Rumus rasio ekonomis belanja daerah adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan Mahmudi (2019) dapat digunakan rumus sbb:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi biaya belanja daerah}}{\text{anggaran Biaya belanja Daerah}} \times 100\%$$

Indikator yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat rasio ekonomis dari hasil perhitungan yang dilakukan, maka dapat menggunakan formula rasio ekonomis adalah klasifikasi atas pengukuran rasio ekonomis.

Tabel 2.1

Klasifikasi Pengukuran Rasio Ekonomis

Persentase	Kriteria
100% keatas	Sangat Ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%-90%	Cukup Ekonomis
60%-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber: Mahmudi (2019)

2.1.3.7 Indikator Efisiensi Pendapatan dan Belanja Daerah

Efisiensi pendapatan dan belanja daerah berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pendapatan dan belanja daerah. rumus efisiensi belanja daerah adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan penelitian Mahmudi (2019) dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{belanja daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Indikator yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat rasio efisiensi dari hasil perhitungan yang dilakukan, maka dapat menggunakan formula rasio efisiensi adalah klasifikasi atas pengukuran rasio efisiensi.

Tabel 2.2
Klasifikasi Pengukuran Efisiensi

Persentase	Kriteria
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mahmudi (2019)

2.1.3.8 Indikator Efektivitas Pendapatan dan Belanja Daerah

Keberadaan Belanja Daerah harus ditentukan dari target yang dapat diperolehnya setiap tahun dan ketercapainnya dapat dilihat dalam realisasi yang diperoleh setiap tahun dari pendapatan daerah tersebut. Dengan demikian untuk menghitung efektivitas penerimaan pendapatan Daerah menurut Mahmudi (2019) dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Indikator untuk mengetahui tingkat efektivitas dari hasil perhitungan menggunakan formula efektivitas adalah klasifikasi pengukuran efektivitas.

Tabel 2.3
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
100% keatas	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2019)

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Hasil penelitian	Sumber
Nindy Cahya Feriska Sari	Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah	Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten	https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id

Nama	Judul	Variabel	Hasil penelitian	Sumber
(2014)	Daerah Dengan Menggunakan Prinsip <i>Value For Money</i> (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013)	Penerapan konsep melalui <i>value for money</i>	Sumenep periode tahun 2010-2013 secara keseluruhan adalah baik	
Wayan Cipta (2014)	Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Berdasarkan <i>Value For Money</i> Audit Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011	<i>Value For Money</i> Variabel, Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2007-2011 secara total berada pada kategori sangat baik, akan tetapi jika dilihat dari rata-rata rasio: (1) ekonomi berada pada kriteria sangat ekonomis, (2) efisiensi berada pada kriteria cukup efisien, dan (3) efektivitas	https://ejournal.undi.ksha.ac.id/
Isna Ardila (2015)	Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan <i>Value for money</i> pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	Kinerja Keuangan, Pendekatan <i>value for money</i>	Hasil penelitian menunjukkan untuk tingkat ekonomis selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 102.27%, tetapi peningkatan yang terjadi membuat rasio tidak memenuhi standar ekonomis <i>value for money</i> . Tingkat efisiensi selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 107.69%, rasio berada di atas 100% sehingga untuk rasio efisiensi	https://Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 2015 journal.umsu.ac.id

Nama	Judul	Variabel	Hasil penelitian	Sumber
			tidak memenuhi standar efesien value for money. Rasio efektivitas selama 4 tahun terakhir sudah memenuhi standar sehingga menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sudah efektif dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, tetapi tetap diperlukan adanya peningkatan pelayanan agar efektivitas Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tercapai lebih baik lagi.	
Kevin R.M (2015)	Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dikaitkan Dengan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung	Kinerja Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah Kota Bitung dalam khususnya pada PAD dilihat dari tingkat kemandirian masih rendah dan memiliki kecenderungan menurun. Jika dilihat dari keefektifan, secara umum dapat dikatakan sangat efektif. Dilihat dari tingkat keserasian, secara umum belum serasi karena kinerja PAD pada belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung.	https://ejournal.unsrat.ac.id/
Masita Machmud (2014)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi	Kinerja keuangan daerah	Berdasarkan hasil penelitian, dapat digambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi	https://ejournal.unsrat.ac.id/

Nama	Judul	Variabel	Hasil penelitian	Sumber
	Utara Tahun 2007-2012		Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih mengalami angka yang naik turun untuk ketiga rasio yang diukur dalam pengelolaan keuangan daerah.	

2.3 Kerangka Berfikir

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Bahkan untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (*equity and service coverage*). Tujuan *value for money* adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja pemerintah. Mardiasmo (2018)

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk mengukur tingkat kinerja dari dinas pendapatan asli daerah dapat dilakukan berdasarkan konsep *value for money*, dengan menggunakan konsep ini, Pemerintah Kota dapat memperhitungkan seberapa besar pendapatan asli daerah

yang berdasarkan dari jumlah pajak daerahnya yang dapat dinilai dari tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan suatu kegiatan.

Berdasarkan dari Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa untuk Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat disebutkan bahwa untuk struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.

Rasio ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

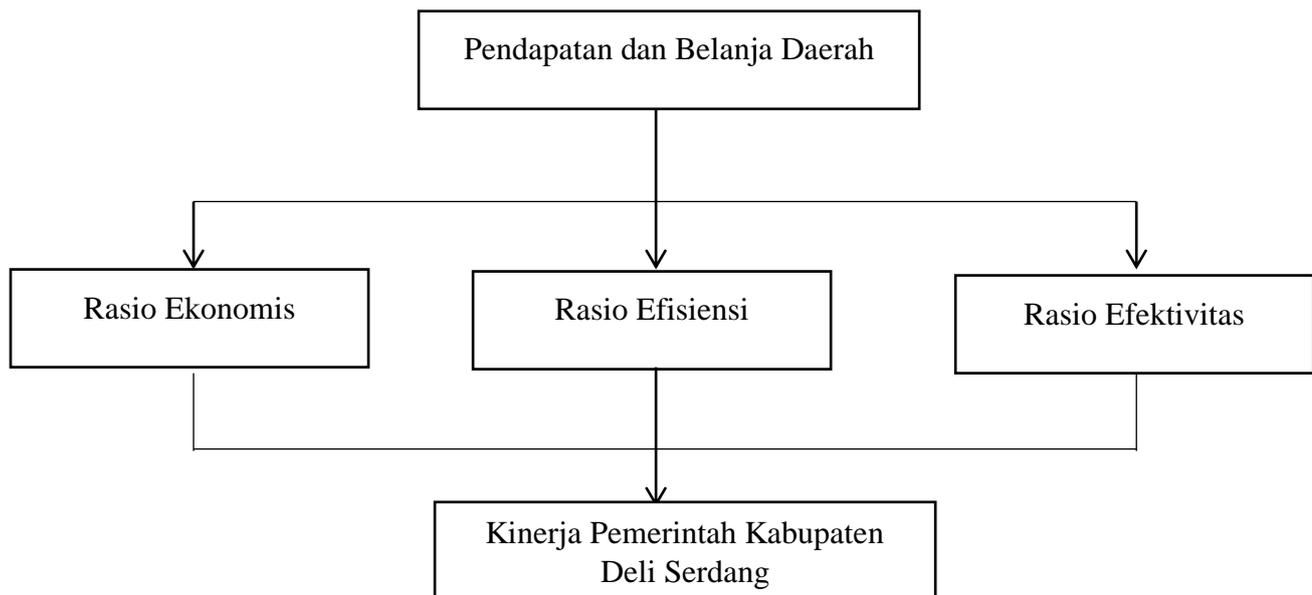
Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara *input* (masukan) dan *output* (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan). Dengan demikian efisiensi belanja daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase biaya pemungutan belanja daerah dibagi realisasi pendapatan daerah. Pengelolaan belanja daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi atau rasio biaya pungut tidak melebihi 5%. Semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Efektivitas adalah seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan efektivitas belanja daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan prosentase perbandingan realisasi penerimaan pendapatan daerah dengan anggaran pendapatan daerah. Rasio belanja daerah dikatakan efektif jika rasio belanja daerah mencapai angka minimal 1 atau 100%. Yang didapat dari perhitungan interpretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas

belanja daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif.

Fungsi rasio ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran organisasi sektor publik. Rasio yang menggambarkan perbandingan biaya dengan realisasi pendapatan menunjukkan rasio efisiensi. Perbandingan kemampuan pemerintah daerah merealisasikan PAD dibanding dengan target yang ditetapkan menunjukkan rasio efektivitas.

Hasil perhitungan rasio ekonomis, efisiensi, serta efektivitas tersebut dapat menggambarkan kinerja keuangan yang dapat diukur *value for money* dalam pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Deli Serdang yang dapat dilihat dalam kerangka berpikir dibawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Sehingga metode penelitian satu ini fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berupa data-data jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Deli Serdang sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

3.2 Defenisi Operasional Penelitian

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan konsep *Value for Money* merupakan pengukuran kinerja yang dilakukan untuk mengetahui seberapa ekonomi, efisien dan efektif penggunaan pendapatan daerah dalam membiayai kegiatan daerah pada setiap periode, cara pengukuran kinerja pemerintah berdasarkan value for money dapat dilakukan dengan berbagai rasio, diantaranya adalah:

1. Rasio Ekonomis adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya.

Rasio ekonomi adalah mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran

tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Rumus rasio ekonomis belanja daerah adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan Mahmudi (2019) dapat digunakan rumus sbb:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi biaya belanja daerah}}{\text{Anggaran Biaya belanja Daerah}} \times 100\%$$

2. Efisiensi belanja daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentase belanja daerah dibagi realisasi pendapatan daerah.

Efisiensi pendapatan dan belanja daerah berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pendapatan dan belanja daerah. rumus efisiensi belanja daerah adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan penelitian Mahmudi (2019) dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{belanja daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Efektivitas Pendapatan daerah diukur dengan realisasi pendapatan daerah dengan anggaran pendapatan daerah.

Keberadaan Belanja Daerah harus ditentukan dari target yang dapat diperolehnya setiap tahun dan ketercapainnya dapat dilihat dalam realisasi yang diperoleh setiap tahun dari pendapatan daerah tersebut. Dengan demikian untuk menghitung efektivitas penerimaan pendapatan Daerah menurut Mahmudi (2019) dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang, yang beralamat di Jalan Negara No. 11 Lubuk Pakam.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan mulai dari bulan Juni sampai Oktober 2021. Rencana kegiatan penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rincian waktu penelirian

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian																			
		Juni 2021				Juli 2021				Agustus 2021				September 2021				Oktober 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul				■																
2	Riset awal					■	■	■	■												
3	Pembuatan proposal									■	■	■	■								
4	Bimbingan Proposal													■	■	■	■				
5	Seminar Proposal																	■			
6	Riset																				
7	Penyusunan Skripsi																				
8	Bimbingan Sekripsi																				
9	Sidang Meja Hijau																				

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis Data yang digunakan adalah data kuantitatif, dimana data ini berupa data yang dihitung berupa data anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan realisasi pendapatan dan belanja daerah.

3.4.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang diperoleh berupa data dokumentasi laporan jumlah hasil dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, dan laporan hasil dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah pemerintah Kabupaten Deli Serdang. selama Tahun 2016 sampai tahun 2020 yang diperlukan oleh peneliti.

3.5 Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif adalah analisis data terhadap data-data yang mengandung angka-angka atau numerik tertentu. Keseluruhan data yang sudah diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik sebagai berikut: data yang diperoleh yaitu data pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Deli Serdang di olah menggunakan rumus rasio ekonomis, mengukur tingkat efisiensi dan mengukur tingkat efektivitas sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah kinerja Badan Pengelola Keuangan aset Kabupaten Deli Serdang sudah ekonomis, efisien dan efektivitas.

3.5.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan mengenai rasio ekonomis pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Deli Serdang rasio ekonomis digunakan untuk mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik, dimana pengukuran tersebut memerlukan data anggaran pengeluaran dan realisasinya. Semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang semakin baik, Mengukur tingkat efisiensi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan data pendapatan dan belanja daerah berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pendapatan dan belanja daerah sehingga dapat dilihat apakah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang efisiensi dalam mengelola keuangan daerah. dan Mengukur tingkat efektivitas Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang, keberadaan Belanja Daerah harus ditentukan dari target yang dapat diperolehnya setiap tahun dan ketercapainnya dapat dilihat dalam realisasi yang diperoleh setiap tahun dari pendapatan daerah, sehingga dapat dilihat apakah kinerja BPKAD Kabupaten Deli Serdang sudah efektif atau tidak efektif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Kabupaten Deli Serdang maka diharapkan Kabupaten Deli Serdang mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada dimiliki oleh Kabupaten Deli Serdang. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Deli Serdang, maka nantinya akan mampu meningkatkan pajak daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Meningkatnya pendapatan daerah hendaknya tidak harus ditempuh dengan cara kebijaksanaan menaikkan tarif saja, tetapi yang lebih penting dengan memperbaiki atau menyempurnakan administrasi, sistem dan prosedur serta organisasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang ada sekarang. Namun pada kondisi saat ini, dirasakan tuntutan untuk perlunya meninjau kembali dan penyempurnaan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA).

Reformasi keuangan daerah berhubungan dengan perubahan sumber-sumber pembiayaan pemerintah daerah yang meliputi perubahan sumber-sumber penerimaan. Reformasi keuangan daerah secara langsung juga akan berdampak pada perlunya dilakukan anggaran daerah. Reformasi anggaran tidak hanya pada aspek perubahan struktur APBD, namun juga diikuti dengan perubahan proses

penyusunan anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja.

Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem anggaran yang mencakup tujuan dan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. (Mardiasmo, 2017).

Anggaran kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana organisasi.

Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting karena penganggaran merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja negara yang cenderung tanpa batas. Berbagai macam sistem penganggaran dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana, dan pertanggung jawaban kepada publik.

Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan struktur organisasi pemerintah harus sesuai dengan program organisasi pemerintah tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula pada penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.

Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *Value for Money* atau pengawasan atas kinerja *output*. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut, anggaran berbasis kinerja dilengkapi dengan teknik penganggaran analitis

Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerintah akan menyalahgunakan kedudukan mereka dan cenderung boros (*over spending*). Menurut pendekatan anggaran berbasis kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan *internal cost awareness*, audit keuangan, audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. Dengan kata lain, pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan *cost minded* dan harus efisien. Selain didorong untuk menggunakan dana secara ekonomis, pemerintah juga dituntut untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya program dan tolak ukur sebagai standar kinerja.

Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah/instansi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja, organisasi atau unit organisasi tidak hanya diwajibkan menyusun anggaran atas dasar fungsi, program, kegiatan

dan jenis belanja, tetapi juga merencanakan kinerja yang ingin dicapai. Kinerja tersebut antara lain dalam bentuk keluaran (*output*) dari kegiatan yang akan dilaksanakan dan hasil (*outcome*) dari program yang telah ditetapkan.

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. Pengembangan indikator kinerja berpusat pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan atau yang dikenal dengan 3E.

a. Ekonomis

Ekonomis artinya hemat dan cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya

b. Efisien

Efisien artinya berdaya guna dalam penggunaan sumber daya untuk hasil yang maksimal.

c. Efektif

Efektif artinya berhasil guna dalam mencapai tujuan dan sasaran.

4.2 Analisis Data

1) Ekonomis

Ekonomi memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya (*input*) sebaiknya dengan harga yang lebih rendah (*spending less*) atau harga yang mendekati harga pasar. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter.

Suatu kinerja organisasi dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih kecil dari pada target anggaran dan dapat mencapai *output* (keluaran) yang maksimal. Perhitungan tersebut digunakan karena sulitnya mengkonversikan SDM dan sarana dan prasarana yang digunakan ke dalam satuan moneter dan menentukan berapa harga *input* yang sesungguhnya diperlukan

Untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi biaya belanja daerah}}{\text{anggaran Biaya belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{\text{Rp } 3.384.048.577.213.08}{\text{Rp } 3.384.048.577.213.08} \times 100\% \\ &= 91,19\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Rp } 3.377.783.242.083.88}{\text{Rp } 3.766.358.253.124.00} \times 100\% \\ &= 98,68\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp } 3.497.039.137.164.00}{\text{Rp } 3.733.345.654.763.76} \times 100\% \\ &= 93,67\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp } 3.529.117.634.226.00}{\text{Rp } 4.016.480.823.937.00} \times 100\% \\ &= 87,86\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp } 2.770.409.994.709,19}{\text{Rp } 3.190.043.526.723,12} \times 100\% \\ &= 86,84\% \end{aligned}$$

Table 4.1**Rasio Ekonomis Kabupaten Deli Serdang**

Tahun	Anggaran Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Rasio Ekonomis (%)
2016	3.384.048.577.213.08	3.086.110.287.501.00	91,19
2017	3.766.358.253.124.00	3.377.783.242.083.88	89,68
2018	3.733.345.654.763.76	3.497.039.137.164.00	93,67
2019	4.016.480.823.937.00	3.529.117.634.226.00	87,86
2020	3.190.043.526.723,12	2.770.409.994.709,19	86,84

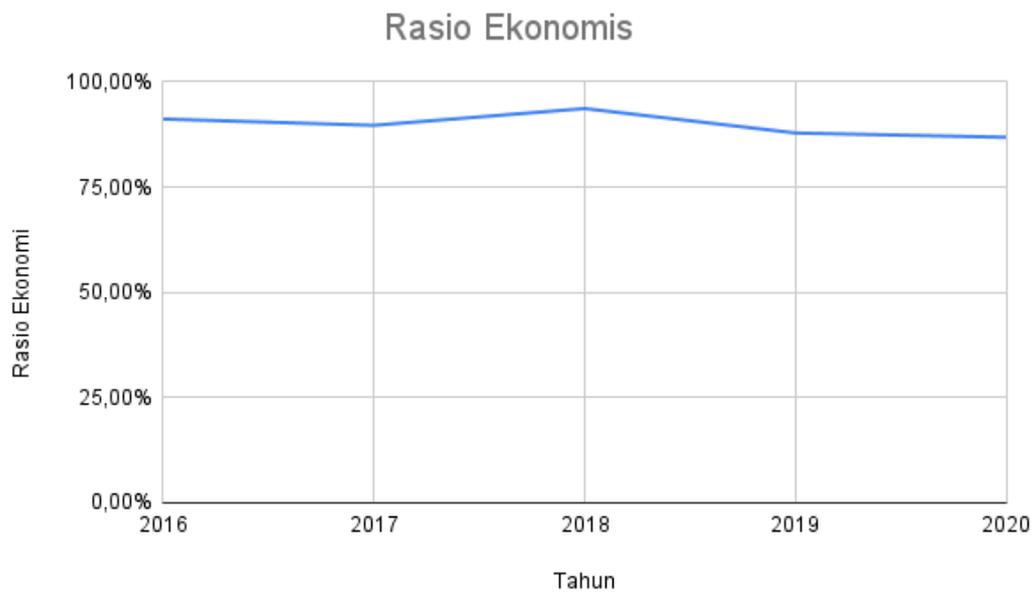
Sumber: Data diolah 2021

Berdasarkan pengukuran rasio ekonomis pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2016 sampai dengan 2020, dapat dilihat bahwa tingkat ekonomis pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2016 sebesar 91,19% yang termasuk kedalam kategori ekonomis karena berada diantara 90%-100%, untuk tahun 2017 rasio ekonomis mengalami penurunan dengan rasio 89,68% sehingga menjadi cukup ekonomis dikarenakan termasuk dalam kategori 80%-90%, untuk tahun 2018 rasio ekonomis mengalami kenaikan sehingga menjadi 93,67% yang termasuk kedalam ekonomis karena berada diantara 90%-100% sedangkan ditahun 2019 rasio ekonomis Kabupaten Deli Serdang kembali mengalami penurunan dengan rasio ekonomis sebesar 87,86% yang termasuk kategori cukup ekonomis karena berada diantara 80%-90% dan di tahun 2020 rasio ekonomis tidak mengalami perubahan yaitu dengan jumlah rasio ekonomis sebesar 86,84% dengan kategori cukup ekonomis karena berada diantara 80%-90%. Dimana standard dari rasio ekonomis yaitu sebesar 100% yang dapat

dikatakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sudah cukup ekonomis dalam melakukan penghematan atas biaya pajak daerah.

Untuk target belanja daerah setiap tahunnya mengalami fluktuasi, yang juga diikuti tingkat biaya belanja daerah juga mengalami fluktuasi, hal ini dibuktikan dengan tingkat rasio ekonomi atas pemerintah daerah yang dapat dikatakan tidak stabil. Dengan melihat tren tersebut dapat dikategorikan bahwasanya rasio ekonomis pemerintah Kabupaten Deli Serdang cukup ekonomis. Dengan tingkat rasio ekonomi pemerintah daerah tersebut, menunjukkan bahwa penghematan dalam belanja pemerintah daerah mengalami kestabilan.

Perkembangan Rasio Ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :



Rasio ekonomis pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dikatakan stabil. Melalui analisis rasio ekonomis dapat diketahui seberapa besar realisasi belanja pemerintah daerah

Kabupaten Deli Serdang terhadap target belanja yang telah ditentukan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang yang seharusnya dicapai pada periode tertentu.

Rasio ekonomi sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak ada pemborosan. Dengan semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. (Mahsun, 2016).

3. Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang seminimum mungkin.

Kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah < 1 atau tidak lebih dari 100%. Semakin kecil nilai rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang.

Dalam penelitian ini pengukuran efisien dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{belanja Kab Deli Serdang}}{\text{Pendapatan Kab Deli Serdang}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} 2016 &= \frac{\text{Rp}3.086.110.287.501.00}{\text{Rp}3.484.303.242.110.00} \times 100\% \\ &= 88,57\% \end{aligned}$$

$$2017 = \frac{Rp3.377.783.242.083.88}{Rp3.405.026.538.803.00} \times 100\%$$

$$= 99,19\%$$

$$2018 = \frac{Rp3.377.783.242.083.88}{Rp3.405.026.538.803.00} \times 100\%$$

$$= 93,67\%$$

$$2019 = \frac{Rp3.377.783.242.083.88}{Rp3.405.026.538.803.00} \times 100\%$$

$$= 98,74\%$$

$$2020 = \frac{Rp3.377.783.242.083.88}{Rp3.405.026.538.803.00} \times 100\%$$

$$= 83,06\%$$

Tabel 4.2 Rasio Efisiensi Kabupaten Deli Serdang

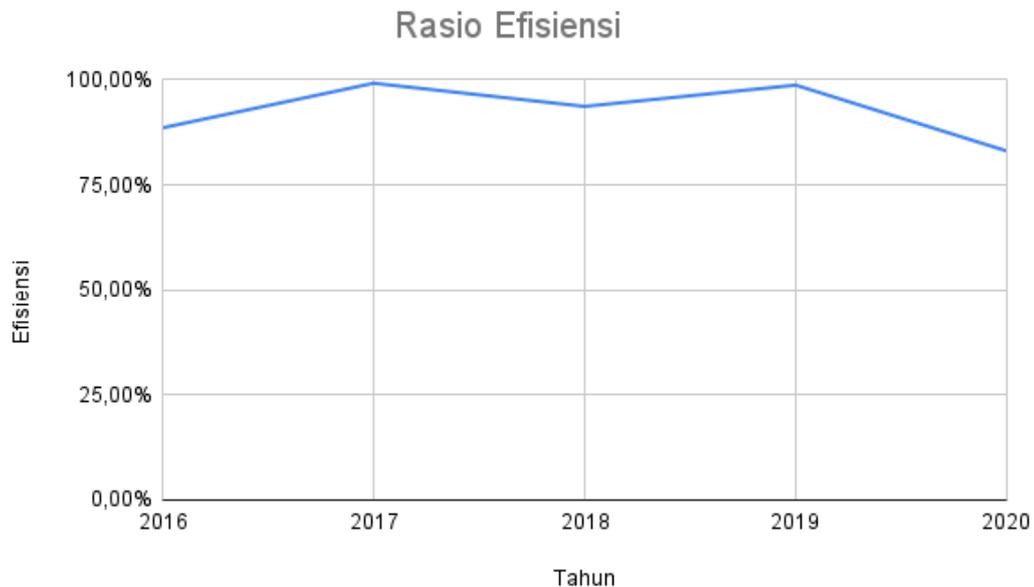
Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Efisien
2016	3.086.110.287.501.00	3.484.303.242.110.00	88,57%
2017	3.377.783.242.083.88	3.405.026.538.803.00	99,19%
2018	3.497.039.137.164.00	3.733.345.654.763.00	93,67%
2019	3.529.117.634.226.00	3.573.056.389.618.75	98,74%
2020	2.770.409.994.709,19	3.335.349.826.580.82	83.06%

Sumber: Data di olah 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat data pengukuran rasio efisien Pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, di tahun 2016 tingkat efisien belanja daerah disebut cukup efisien, di tahun 2017 sampai dengan 2019 tingkat efisien belanja daerah Kabupaten Deli Serdang dapat di Kategorikan kurang efisien sedangkan di tahun 2020 tingkat efisiensi belanja daerah dapat dikategorikan tidak efisien. Hal ini tidak cukup baik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli

Serdang, dimana dengan meningkatnya rasio efisien belanja daerah terjadi dikarenakan besarnya jumlah belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang.

Perkembangan rasio efisiensi daerah Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat



dari grafik dibawah ini:

Untuk belanja daerah dalam memperoleh pendapatan daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dan penurunan, hal ini tidak baik bagi pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang. Dengan meningkatkan rasio efisiensi atas pendapatan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menunjukkan bahwa kinerja dari BPKAD Kabupaten Deli Serdang mengalami penurunan karena besarnya belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang untuk meningkatkan pendapatan Kabupaten Deli Serdang.

Menurut Mardiasmo (2013), yang menyatakan bahwa dengan semakin rendahnya rasio efisiensi pajak daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam kinerjanya semakin baik.

3.Rasio Efektivitas

Efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan akibat dari dampak (*outcome*) dari output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah lebih dari 100%. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka semakin baik kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Dalam penelitian ini pengukuran efektivitas menggunakan pengukuran sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} 2016 &= \frac{\text{Rp}3.484.303.242.110.00}{\text{Rp}3.241.872.674.803.00} \times 100\% \\ &= 107,47\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2017 &= \frac{\text{Rp}3.405.026.538.803.00}{\text{Rp}3.498.428.422.033.00} \times 100\% \\ &= 97,33\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2018 &= \frac{\text{Rp}3.733.345.654.763.00}{\text{Rp}3.640.579.921.809.00} \times 100\% \\ &= 102,54\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2019 &= \frac{\text{Rp}3.573.056.389.618.75}{\text{Rp}3.986.480.823.937.00} \times 100\% \\ &= 89,62\% \end{aligned}$$

$$2020 = \frac{Rp3.335.349.826.580.82}{Rp3.951.483.270.425.00} \times 100\%$$

$$= 84,40\%$$

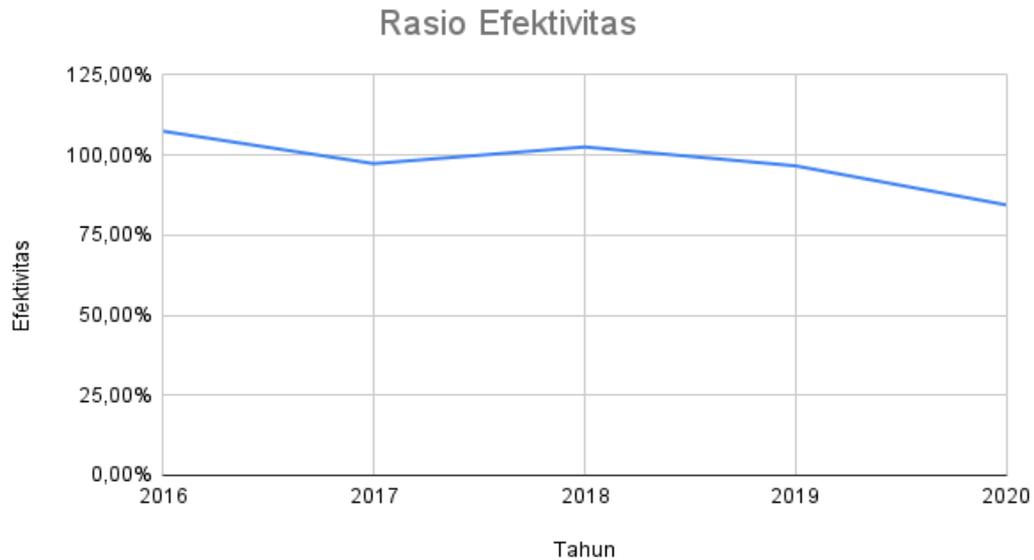
Tabel 4.3 Efektivitas Pendapatan Pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang

Tahun	Anggaran Pendapatan Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Efektifitas (%)
2016	3.241.872.674.803.00	3.484.303.242.110.00	107,47
2017	3.498.428.422.033.00	3.405.026.538.803.00	97,33
2018	3.640.579.921.809.00	3.733.345.654.763.00	102,54
2019	3.986.480.823.937.00	3.573.056.389.618.75	89,62
2020	3.951.483.270.425.00	3.335.349.826.580.82	84,40

Sumber: Data diolah 2021

Dari data laporan anggaran pendapatan dan realisasi anggaran pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang dalam kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat pada tahun 2016 bahwa realisasi pendapatan yaitu sebesar 107,47%, pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu menjadi 97,33%, di tahun 2018 realisasi pendapatan mengalami kenaikan menjadi 102,54%, di tahun 2019 kembali mengalami penurunan sehingga menjadi 89,62% sedangkan ditahun 2020 terus mengalami penurunan menjadi 84,40%. Sehingga dapat diketahui bahwa di tahun 2016 dapat dikategorikan sangat efektif, di tahun 2017 dikategorikan menjadi efektif, di tahun 2018 kembali menjadi kategori sangat efektif dan di tahun 2019 dan di tahun 2020 menjadi kategori cukup efektif.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi pendapatan daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu.



Dengan adanya penargetan realisasi pendapatan daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Perkembangan efektivitas pendapatan daerah dapat dilihat dalam grafik berikut:

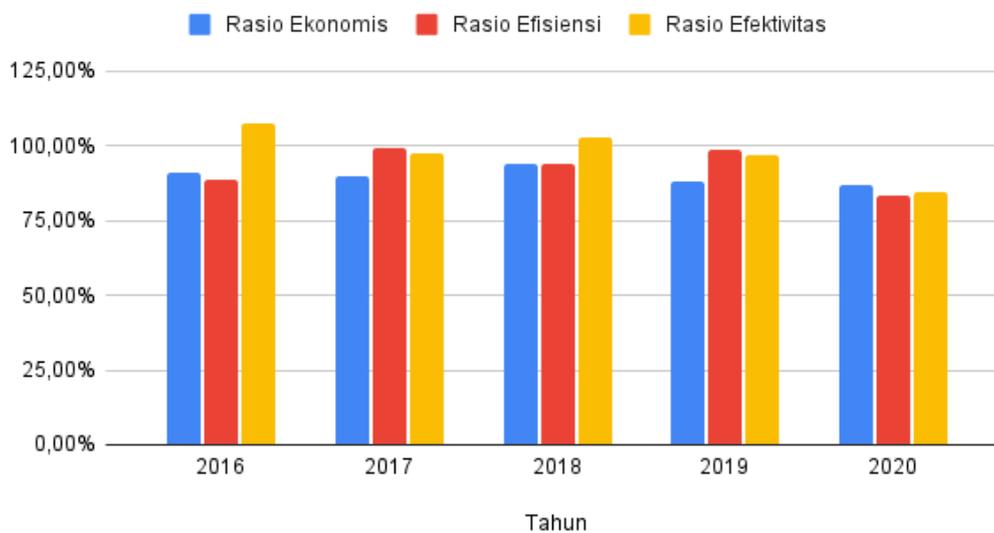
Untuk target pendapatan daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan untuk tingkat realisasi atas pendapatan daerah cenderung juga mengalami peningkatan, hal ini dibuktikan dengan tingkat rasio efektivitas atas pendapatan daerah yang mengalami penurunan. Dengan menurunkan rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah mengalami penurunan pada pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang.

Menurut Mardiasmo (2013), yang menyatakan bahwa untuk rasio efektivitas merupakan tingkat dari pencapaian atas hasil program dengan target yang

ditetapkan. Dengan semakin tinggi rasio efektivitas pajak daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin efektif.

Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan metode *Value For Money* yang diukur dengan menggunakan rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat dari trend dibawah ini:

Rasio Ekonomis, Rasio Efisiensi, dan Rasio Efektivitas



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa untuk rasio ekonomis untuk biaya dari pembelanjaan daerah mengalami fluktuatif, sedangkan untuk rasio efisiensi belanja daerah Kabupaten Deli Serdang di kurun 5 tahun terakhir yaitu ditahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami penurunan, ditahun 2016 tingkat efisien belanja daerah disebut cukup efisien, di tahun 2017 sampai dengan 2019 tingkat efisien belanja daerah Kabupaten Deli Serdang dapat di Kategorikan kurang efisien sedangkan di tahun 2020 tingkat efisiensi belanja daerah dapat dikategorikan tidak efisien dan rasio efektivitas pendapatan Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan dan penurunan ditahun 2016 dapat dikategorikan

sangat efektif, di tahun 2017 dikategorikan menjadi efektif, di tahun 2018 kembali menjadi kategori sangat efektif dan di tahun 2019 dan tahun 2020 menjadi kategori cukup efektif.

4.3 Pembahasan

Pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang bila diukur menggunakan *value for money* mengalami penurunan, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang diukur dengan menggunakan *value for money* kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuatif, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. rasio ekonomis pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2016 sampai dengan 2020, dapat dilihat bahwa tingkat ekonomis pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2016 sebesar 91,19% yang termasuk kedalam kategori ekonomis karena berada diantara 90%-100%, untuk tahun 2017 rasio ekonomis mengalami penurunan dengan rasio 89,68% sehingga menjadi cukup ekonomis dikarenakan termasuk dalam kategori 80%-90%, untuk tahun 2018 rasio ekonomis mengalami kenaikan sehingga menjadi 93,67% yang termasuk kedalam ekonomis karena berada diantara 90%-100% sedangkan ditahun 2019 rasio ekonomis Kabupaten Deli Serdang kembali mengalami penurunan dengan rasio ekonomis sebesar 87,86% yang termasuk kategori cukup ekonomis karena berada diantara 80%-90% dan di tahun 2020 rasio ekonomis tidak mengalami perubahan yaitu dengan jumlah rasio ekonomis sebesar 86,84% dengan kategori cukup ekonomis karena berada diantara 80%-90%. Dimana standard dari rasio ekonomis yaitu sebesar

100% yang dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sudah cukup ekonomis dalam melakukan penghematan atas biaya pajak daerah.

Rasio ekonomis Kabupaten Deli Serdang mengalami kestabilan atau bisa disebut dengan sudah cukup ekonomis dalam penghematan dalam belanja pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan untuk rasio efektivitas mengalami fluktuasi akan tetapi hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah dapat dikategorikan sudah efektif.

Hal ini di dukung dengan teori Rasio ekonomi sering disebut penghematan yang mencakup pengelolaan secara cermat dan tidak ada pemborosan. Dengan semakin besar persentase ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. (Mahsun, 2016). Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Wayan Cipta (2014) dilihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2007-2011 secara total berada pada kategori sangat baik, dan jika dilihat dari Rasio ekonomis dapat dikategorikan sangat ekonomis.

2. Pengukuran rasio efisien Pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, di tahun 2016 tingkat efisien belanja daerah disebut cukup efisien, di tahun 2017 sampai dengan 2019 tingkat efisien belanja daerah Kabupaten Deli Serdang dapat di Kategorikan kurang efisien sedangkan di tahun 2020 tingkat efisiensi belanja daerah dapat dikategorikan tidak efisien. Hal ini tidak cukup baik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, dimana dengan meningkatnya rasio efisien belanja daerah terjadi dikarenakan besarnya jumlah belanja

daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh Pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang.

Rasio efisiensi Kabupaten Deli Serdang tidak mengalami kestabilan hal ini dapat dilihat bahwa kurun waktu 5 tahun terakhir rasio efisiensi memiliki rasio efisiensi menurun, hal ini disebabkan oleh peningkatan terjadi dikarenakan besarnya belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Sedang, bahkan realisasi belanja daerah melebihi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan meningkatnya rasio efisiensi menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah mengalami penurunan dalam menghemat belanja daerah, atas pendapatan daerah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Hal ini sejalan dengan teori yang di kemukakan oleh Menurut Mardiasmo (2013), yang menyatakan bahwa dengan semakin rendahnya rasio efisiensi pajak daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam kinerjanya semakin baik. Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Masita Machmud (2014) digambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih mengalami angka yang naik turun untuk ketiga rasio yang diukur dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Anggaran pendapatan dan realisasi anggaran pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang dalam kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, pada tahun 2016 bahwa realisasi pendapatan yaitu sebesar 107,47%, pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu menjadi

97,33%, di tahun 2018 realisasi pendapatan mengalami kenaikan menjadi 102,54%, di tahun 2019 kembali mengalami penurunan sehingga menjadi 89,62% sedangkan ditahun 2020 terus mengalami penurunan menjadi 84,40%. Sehingga dapat diketahui bahwa di tahun 2016 dapat dikategorikan sangat efektif, di tahun 2017 dikategorikan menjadi efektif, di tahun 2018 kembali menjadi kategori sangat efektif dan di tahun 2019 dan di tahun 2020 menjadi kategori cukup efektif.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Nindy Feriska Sari (2014) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sumenep periode tahun 2010-2013 secara keseluruhan adalah baik.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak dari tempat dan waktu penelitian, dan pengukuran kinerja Pemerintah Daerah, dimana peneliti dilakukan dengan pengukuran menggunakan konsep *value for money*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang berdasarkan penelitian yang di ukur melalui konsep *value for money* adalah :

1. Kinerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan metode *value for money* yang diukur dengan rasio ekonomis, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuatif.
2. Rasio ekonomis Kabupaten Deli Serdang mengalami kestabilan atau bisa disebut dengan sudah cukup ekonomis dalam penghematan dalam belanja pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan untuk rasio efektivitas yang mengalami fluktuatif, tahun 2016 dapat dikategorikan sangat efektif, di tahun 2017 dikategorikan menjadi efektif, di tahun 2018 kembali menjadi kategori sangat efektif dan di tahun 2019 dan di tahun 2020 menjadi kategori cukup efektif. Penurunan yang terjadi untuk rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah mengalami penurunan atas memaksimalkan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
3. Rasio efisiensi daerah ditahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan akan tetapi di tahun 2016 tingkat efisien belanja daerah disebut cukup efisien, di tahun 2017 sampai dengan

2019 tingkat efisien belanja daerah Kabupaten Deli Serdang dapat di Kategorikan kurang efisien sedangkan di tahun 2020 tingkat efisiensi belanja daerah tidak efisien.

5.2 Saran

1. Sebaiknya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dapat melakukan penghematan akan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan. Sehingga kinerja atas Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dari segi ekonomis dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun berikutnya.
2. Untuk lebih meningkatkan target dan realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang harus lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitas SDM yang ada, agar dalam proses pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah dapat berjalan dengan baik dan benar.
3. Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang diharapkan lebih menjaga dan memperhatikan pos-pos biaya yang tidak begitu diperlukan agar penekanan biaya dapat dimaksimalkan sehingga realisasi pendapatan daerah tetap efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latief, Wandi Wilanda. 2019. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja Karyawan Pada Biro Pengadaan Jasa PT. Semen Padang. Jurnal Sains dan Teknologi. Volume. 19 . Nomor 1. Hal 56-60
- Abdul Halim. (2019). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat
- Hanum, Z. (2011). *Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai*. 10(April), 1–23
- Hery. 2019. Manajemen Kinerja. Jakarta : PT Grasindo
- Koeshardjono, R. H., Priantono, S., & Amani, T. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Manajerial Dan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderating. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 4(2).
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penerbit STIM YPKN
- Mardiasmo.(2017).Efisiensi dan Efektifitas.Jakarta: Andy.
- Mardiasmo. (2018). Buku Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi.
- Muchlisin, Riadi. 2020. Pengertian dan Fungsi Perbankan. Bandung: Alfabeta
- Rahayu, Sri. 2018. Pengaruh penggunaan informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja perusahaan. Medan,
- Sihombing, Pardomuan. 2018. Corporate Financial Management. PT. Penerbit IPB Pres: Bogor
- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 93–101.
- Suryani, I. (2019). Analisis Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

- Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018. *Jurnal Riset Akuntansi*, 11(2), 38–46.
- Wibisono, A., & , S. (2016). Pengaruh Kualitas Jasa Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan. *PERFORMANCE “ Jurnal Bisnis & Akuntansi,”* 6(2), 32.
- Yuwono Eddy, dan Mudjia Rahardjo. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder. Jakarta: Raja grafindo Persada
- Zain, W.2017.Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar
- Ardila, I., & Putri, ayu anindya. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 52–64.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Rabu, 29 September 2021* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Julianda Syahputra Tanjung*
NPM. : 1705170090
Tempat / Tgl.Lahir : Barus, 27 Juli 1998
Alamat Rumah : Jl.Tuamang No. 129
Judul Proposal : Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Berdasarkan Value For Money (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Berdasarkan Value For Money (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
Bab I	- Latar belakang masalah harus menguraikan alasan pemilihan variabel - Uraikan identifikasi masalah dalam latar belakang masalah
Bab II	- Menguraikan keuangan daerah terlebih dahulu - Jelaskan gambar kerangka dengan dukungan hasil-hasil penelitian terdahulu
Bab III	- Teknik pengumpulan data lebih dijelaskan - Teknik analisis deskriptif lebih dijelaskan
Lainnya	-Daftar pustaka masukan 3 dosen umsu
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 29 September 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., M.Si

Pembimbing

Novi Fadhila, SE.,MM

Pembanding

Dr. Syafrida Hani, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 29 September 2021* menerangkan bahwa:

Nama : Julianda Syahputra Tanjung
NPM : 1705170090
Tempat / Tgl.Lahir : Barus, 27 Juli 1998
Alamat Rumah : Jl.Tuamang No. 129
Judul Proposal : Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Berdasarkan Value For Money (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing :

Medan, 29 September 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., M.Si

Pembimbing

Novi Fadhila, SE.,MM

Pemanding

Dr. Syafrida Hani, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2072/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/15/2/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 15/2/2021

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : JULIANDA SYAHPUTRA TANJUNG
NPM : 17051700900
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : 1. Masih rendahnya budaya organisasi dalam menerapkan sistem akuntansi sektor pemerintahan sehingga belum mencapai hasil yang diharapkan
2. Kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan dinilai kurang efektif
- Rencana Judul : 1. Pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai bagian keuangan organisasi sektor pemerintahan dinas perhubungan
2. Pengaruh penerapan standar akuntansi sektor pemerintahan terhadap penerapan budaya organisasi dan kepuasan kerja pada dinas perhubungan
3. Pengaruh budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap efektivitas penerapan akuntansi sektor pemerintahan serta dampaknya pada good governance

Objek/Lokasi Penelitian : Dinas Perhubungan Sumatera Utara

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


(JULIANDA SYAHPUTRA TANJUNG)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2072/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/15/2/2021

Nama Mahasiswa : JULIANDA SYAHPUTRA TANJUNG

NPM : 17051700900

Program Studi : Akuntansi

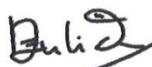
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Tanggal Pengajuan Judul : 15/2/2021

Nama Dosen pembimbing^{*)} : Novi Fadhila, SE, MM (17 Februari 2021)

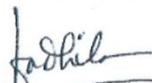
Judul Disetujui^{**)} : ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
BERDASARKAN VALUE FOR MONEY (Studi kasus Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Deli Serdang Provinsi
Sumatera Utara

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Zulia Hanum, SE, M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing


(Novi Fadhila, SE, MM)

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

***) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembar ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20... M

kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
di
Medan

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : J U L I A N D A S Y A H P U T R A T

NPM : 1 7 0 5 1 7 0 0 9 0

Tempat.Tgl. Lahir : B A R U S 2 7 J U L I 1 9 9 8

Program Studi : Akuntansi
Alamat Mahasiswa : J A L A N T U A M A N G N O 1 2 9

Tempat Penelitian : K A N T O R B A D A N P E N G E L O
L A A N D A N A S E T D A E R A H
K A B D E L I S E R D A N G

Alamat Penelitian : J L N P E R B A R A K A N K E C A M
A T A N P A G A R M E R B A U L U
B U K P A K A M

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

- 1. Transkrip nilai sementara
- 2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Zulia Hanum,S.E.,M.Si)

Wassalam
Pemohon

(Julianda Syahputra Tanjung)



UMSU
Cerdas | Terpercaya

Agar surat ini agar di sebutkan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 1955/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2021

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 11 Juli 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Julianda Syahputra Tanjung
N P M : 1705170090
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara)

Dosen Pembimbing : **Novi Fadhila, SE., MM**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 26 Agustus 2022**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 17 Muharram 1443 H
26 Agustus 2021 M



Dekan

Novi Fadhila, SE., MM., M.Si

C.c.File



UMSU

Unggul | Cerdas | Berkarya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : / II.3 - AU/UMSU- 054/2022
Lamp :
Hal : Undangan Pelaksanaan Ujian Skripsi

Medan, 24 Rajab 1442 H
25 Februari 2022 M

Kepada Yth, Sdr. Pembimbing Skripsi :

Novi Fadhila, SE., MM

Di-

Medan.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatu

Ba'dassalam, sehubungan dengan ini kami mengundang Saudara untuk dapat hadir dalam pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa :

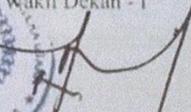
Nama Mahasiswa : Julianda Syahputra Tanjung
Nomor Pokok Mahasiswa : 1705170090
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
Pembimbing : **Novi Fadhila, SE., MM**

Dilaksanakan Pada :

Hari / Tanggal : Jumat / 25 Februari 2022
Waktu : 08.00 WIB Sampai Selesai
Tempat : **Ruang Sidang Lt. II Gedung E.**

Demikian undangan ujian meja hijau ini kami sampaikan, kehadiran saudara sangat menentukan sukses tidaknya pelaksanaan ujian bimbingan saudara, atas perhatian dan kerja samanya serta hadir tepat waktu diucapkan terima kasih.

Wa'alaikumsalam Warohmatullahi Wabarokatu

a.n Dekan
Wakil Dekan - I

Dr. A. Gunawan, SE, M.Si

Tembusan : Peserta Ujian Skripsi
Sdr. **Julianda Syahputra Tanjung**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 1953/II.3-AU/UMSU-05/F/2021
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 17 Muharram 1443 H
26 Agustus 2021 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang
Jln. Negara No.11 Lubuk Pakam
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Julianda Syahputra Tanjung
Npm : 1705170090
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara)

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




Dekan
H. Januri., SE., MM., M.Si

C.c.File



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN DELI SERDANG

JL. MAWAR NO. 8 TEL : (061) 7952370 FAX : (061) 7956076
LUBUK PAKAM – 20514

Lubuk Pakam, 10-09- 2021

Nomor : 0701/607
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UMSU
di_ Medan

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1953/II.3-AU/UMSU-05/F/2021 Tanggal 26 Agustus 2021 Perihal Izin Riset Pendahuluan.

Dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak keberatan dan dapat menyetujui Riset Pendahuluan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang yang akan dilaksanakan oleh :

Nama : Julianda Syahputra Tanjung
NPM : 1705170090
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money

Demikian disampaikan untuk bahan seperlunya.

An. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN DELI SERDANG

SEKRETARIS

KHADIJAH SIREGAR, SE
PENATA TITIK
NIP. 19640521199103 2 006

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Deli Serdang sebagai laporan
2. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN DELI SERDANG

JL. MAWAR NO. 8 TEL : (061) 7952370 FAX : (061) 7956076
LUBUK PAKAM – 20514

Lubuk Pakam, 02 - 02 - 2022

Nomor : 070/027
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Selesai Riset

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UMSU
di
Medan

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 182/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 Tanggal 27 Januari 2022 Perihal Penyelesaian Riset.

Dengan ini diberitahukan bahwa Mahasiswa tersebut telah Menyelesaikan Riset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang yang telah dilaksanakan oleh :

Nama : Julianda Syahputra Tanjung
NPM : 1705170090
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money

Demikian disampaikan untuk bahan seperlunya.

An. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN DELI SERDANG



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Deli Serdang sebagai laporan
2. Yang bersangkutan



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238
Website : <http://perpustakaan.umsu.ac.id> Email : perpustakaan@umsu.ac.id

Jika menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggapnya.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 032/ KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Julianda Syahputra Tanjung
NPM : 1705170090
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 15 Jumadil Akhir 1443 H.
18 Januari 2022 M.

Kepala UPT Perpustakaan

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : JULIANDA SYAHPUTRA TANJUNG
Tempat /Tgl Lahir : Barus, 27 Juli 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Karya Gg. Karang Sari No. 7 A
Anak Ke : 7 dari 7 bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Mizran Tanjung
Ibu : Masrida Lubis
Alamat : Jl. Imam Bonjol

Pendidikan Formal

1. SD Al-Washliyah Barus
2. MTsN 1 Tapanuli Tengah
3. MAN 1 Tapanuli Tengah
4. Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2022

JULIANDA SYAHPUTRA TANJUNG